



DIY Deklarasi Cegah Stunting

• NENI RIDARINI

Stunting juga merupakan masalah pengetahuan, kesadaran, dan gaya hidup.

YOGYAKARTA — Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) menyelenggarakan kampanye dan deklarasi pencegahan *stunting* di GOR Among-rogro Yogyakarta, Jumat (14/12). Plt Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DIY Tavip Agus Rayanto membacakan deklarasi pencegahan *stunting* mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan masyarakat kebanyakan masih salah dalam memahami *stunting* yang dianggap sebagai masalah tinggi badan anak. Padahal, *stunting* merupakan persoalan pertumbuhan otak yang menjadi cikal-bakal potensinya sebagai *human capital* ketika dewasa.

Ada dua syarat anak dapat dikatakan mengalami *stunting*, yakni malnutrisi dan mengalami infeksi kronis. "Jadi tidak benar seorang anak yang bertubuh pendek dikatakan anak *stunting* tanpa memeriksa

kondisi kesehatannya. Bisa saja anak itu pintar dan sehat. Karena *stunting* tidak hanya terjadi di perdesaan atau keluarga miskin, tetapi di kota anak dari keluarga kaya juga banyak yang mengalami *stunting*," ungkapnya.

Stunting, menurut dia, bukan hanya masalah kemampuan mengakses makanan bergizi, layanan kesehatan, sanitasi layak, dan air bersih. Namun lebih pada masalah pengetahuan, kesadaran, dan gaya hidup atau perilaku warga.

Dikatakan, *stunting* merupakan permasalahan paling mendasar yang harus segera diselesaikan. Untuk mengantisipasinya, harus ada pencegahan dari awal. Misalnya sejak calon ibu masih remaja kualitas hidupnya juga harus diperbaiki. Para ibu juga harus memperhatikan dan memprioritaskan asupan gizi anak balitanya.

Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setyaning Astutie, mengatakan angka sasaran *stunting* di DIY 19,8 persen. Sedangkan angka sasaran nasional sebesar 27 persen. WHO menetapkan manakala angka sasaran melebihi 20 persen masuk dalam permasalahan.

"Walaupun di DIY masih di bawah angka WHO, tetapi tentu harus diminimalisir. Melalui kampanye dan deklarasi pencegahan *stunting* bersama kabupaten/kota se DIY

diharapkan dapat menurunkan angka stunting di DIY," kata Pembayun.

Terpisah, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes DIY Inni Hikmatin, mengatakan kasus tertinggi stunting terjadi di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul. Tapi bukan berarti terbanyak apabila dibandingkan jumlah penduduk.

"Untuk mengatasi hal itu harus dikeroyok secara bersama-sama dan tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, melainkan juga harus lintas sektor," katanya kepada *Republika*.

Hal itu juga disampaikan Tavip bahwa deklarasi ini merupakan ajakan kepada kabupaten/ kota se DIY agar punya semangat yang sama untuk melakukan pencegahan *stunting*. Deklarasi ini diperlukan untuk membangun kesepakatan dan minta komitmen dari kabupaten/kota se DIY dan harus muncul di anggaran masing-masing.

"Karena baik buruknya DIY tergantung SDM yang mengelolanya. Sehingga butuh orang-orang yang pandai," tuturnya, pada wartawan di sela acara kampanye dan deklarasi *stunting*.

Kasus *stunting*

Sementara itu, mulai 2019 Pemkot Yogyakarta menganggarkan untuk program penurunan *stunting* yang

terintegrasi lintas sektoral. Karena untuk menurunkan kasus *stunting* ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja.

"Saat ini, kasus *stunting* di kota Yogyakarta sekitar 23 persen dan diharapkan pada 2022 turun menjadi 15 persen," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Fita Yulia Kisworini yang didampingi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tri Mardoyo, di GOR Amongrogo Yogyakarta

Pada 2020, Pemkot Yogyakarta akan membuat program peningkatan kualitas balita dan ini termasuk salah satu untuk mencegah *stunting* secara terintegrasi yang dilaksanakan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk meningkatkan kualitas bayi tentu saja harus dimulai dari remaja dan calon pengantin. Sehingga Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama juga turut berperan.

Sebelum pelaksanaan program tersebut diperlukan aturan yang mengikatnya setidaknya dalam bentuk peraturan wali kota. "Untuk itu sudah dianggarkan di 2019 dan diharapkan perwal tersebut di 2019 sudah ada," kata Fita. Menurut Tri, di 2019 untuk gizi termasuk pencegahan *stunting* dianggarkan sekitar Rp 300-400 juta.

■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005